

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai Eksekusi Putusan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi kasus Perkara Nomor : 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015) maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab Perusahaan tidak mentaati Putusan Perkara Nomor : 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015 disebabkan karena perusahaan yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya selalu mencari alasan dan mengundur waktu dalam pembayaran hak-hak pekerja sebagaimana putusan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perkara Nomor : 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perusahaan beralasan para pekerja dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang dulunya telah salah dalam penulisan nama perusahaan, seharusnya nama perusahaan tersebut PT. Anom Hasil Bumi Raya Mandiri, sedangkan yang digugat oleh pekerja adalah PT. Anom Hasil Bumi Raya sehingga gugatan menjadi kabur.

Terkait kesalahan dalam mengajukan gugatan versi Perusahaan ini telah disebutkan juga dalam agenda sidang eksepsi atau jawaban tergugat pada proses persidangan, namun eksepsi perusahaan tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim, karena hakim menilai antara nama

perusahaan PT. Anom Hasil Bumi Raya Mandiri dengan apa yang digugat oleh penggugat, pada dasarnya sama, dengan pimpinan dan management yang sama. Sehingga alasan perusahaan tidak mau menjalankan putusan pengadilan tidaklah bisa diterima karena pada dasarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dapat dilaksanakan supaya pekerja mendapatkan kepastian hukum, karena kepastian hukum memberi perlindungan kepada *justiciablen* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Pengadilan juga harus paham juga dengan teori Badan Hukum, dimana walaupun nama perusahaan telah berubah, tanggungjawab dia dengan nama yang lama tetap ada, dengan dibebankan kepada nama perusahaan yang baru seadainya nama yang lama tidak dipakai lagi.

2. Kendala dalam Eksekusi Putusan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perkara Nomor : 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015 adalah permasalahan permohonan eksekusi Perkara Nomor : 178 K/Pdt.Sus-PHI/2015, ketika pihak Pengadilan telah melakukan peringatan/ *aan maning* terhadap perusahaan, maka akan menunggu kesediaan perusahaan untuk membayarkannya, tetapi apabila perusahaan tidak mau melaksanakannya, maka akan dilakukan eksekusi secara paksa. Akan tetapi karena dalam perkara ini, tidak ada barang/ harta perusahaan yang disita atau menjadi jaminan untuk dilakukan eksekusi maka Pengadilan meminta kepada pekerja untuk mencari aset-aset perusahaan dan melaporkan kepada pengadilan untuk dilakukan sita dan selanjutnya dilakukan lelang.

Pekerja juga terkendala mencari apa saja harta/ aset perusahaan yang akan disita karena pekerja tidak lagi bekerja disana dan pasti tidak akan boleh oleh pihak keamanan perusahaan (sekuriti) untuk memasuki wilayah perusahaan. Kalaupun meminta bantuan kepada teman-teman pekerja yang masih bekerja di Perusahaan tersebut, mereka tentunya mendapatkan ancaman akan dihentikan kalau membocorkan data aset perusahaan.

3. Langkah yang harus dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang adalah Pengadilan harus tegas, tanpa kompromi kalau sudah masuk pada tahap eksekusi, apabila perusahaan pada waktu yang ditentukan tidak juga membayarkan hak buruh atau menjalankan isi dari putusan maka Pengadilan hendaknya pro aktif untuk melakukan sita jaminan atas aset perusahaan, dan segera mungkin untuk dilakukan lelang, agar pada pekerja yang menang dalam gugatan tidak lama menikmati hasil kerjanya pada perusahaan tersebut. Pengadilan tidak boleh pasif seperti halnya perdata biasa yang diatur dalam hukum acara perdata karena permasalahan ini adalah permasalahan khusus yang harus memakai hukum acara khusus dan cara yang khusus juga.

Pemerintah harus pro aktif juga ketika ada Perusahaan yang tidak menjalankan putusan pengadilan agar memberi teguran terhadap perusahaan supaya taat pada aturan atau putusan Pengadilan. Kalau memungkinkan pemerintah membuat surat edaran untuk tidak melayani



surat menyurat dari Perusahaan yang tidak taat hukum, tidak menjalankan perintah pengadilan serta perusahaan yang tidak membayar pajak. Serta apabila memungkinkan mengganggu dari pasaran perusahaan tersebut.

## B. SARAN

1. Hendaknya Pengadilan apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan perusahaan tidak menjalankan putusan tersebut, maka Pengadilan dengan upaya paksa memerintahkan Perusahaan/ Tegugat melaksanakan putusan tersebut. Apabila pihak Pengadilan tetap meminta pekerja mencari aset-aset perusahaan untuk dieksekusi, tentu pekerja akan mengalami kesulitan untuk mencarinya, karena pekerja tidak memiliki akses masuk kedalam perusahaan dan juga tidak mengetahui aset tersebut dimiliki oleh siapa. Sehingga disini penulis menyarankan agar pengadilan melakukan penyitaan sendiri seperti menyita dalam perkara pidana, yang mudahnya pengadilan melakukan sita terhadap aset-aset korporasi. Perlawanan pihak ketiga apalagi perlawanan pihak termohon eksekusi yang sengaja menunda eksekusi, maka semestinya eksekusi tersebut tetap dilaksanakan.
2. Pengadilan hendaknya mengacu kepada hukum acara khusus perselisihan hubungan industrial dalam melakukan eksekusi, kalau pengadilan berpedoman kepada hukum acara perdata biasa tentunya akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi. Sehingga apabila tidak diatur dalam hukum acara khusus atau dalam UU PPHI, maka



hendaknya Pengadilan meminta petunjuk kepada Mahkamah Agung dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

3. Pada setiap anggaran Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengusulkan adanya biaya prodeo untuk panjar eksekusi, yang nilai gugatannya di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Di samping itu sekiranya anggaran prodeo tidak/belum ada, diharapkan kepada pimpinan pengadilan dan kepolisian membantu pemohon eksekusi yang tidak mampu melalui diskresi yang dimilikinya, sehingga faktor tiadanya biaya dari pemohon eksekusi tidak menghambat eksekusi. Karena sekarang ini walaupun biaya perkara ditanggung negara namun dalam hal biaya pengamanan dari kepolisian tidak ada, sehingga itu juga menjadi penghambat terlaksananya eksekusi. Kepada pihak kepolisian juga bisa membuat anggaran sendiri apabila Pengadilan Hubungan Industrial meminta pengamanan ketika melakukan eksekusi, seperti halnya pengamanan aksi unjuk rasa yang tidak dibebankan kepada peserta aksi tapi tetap menjadi tanggungjawab negara.
4. Aturan pelaksanaan eksekusi ada yang diatur pada Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224 HIR, Pasal 206- 240 Rbg dan Pasal 256 Rbg serta Pasal 1033 Rv. Untuk itu diharapkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas dan mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menjadi Undang-Undang, ataupun perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja yang mana dalamnya juga mengatur mengenai eksekusi



secara jelas, waktu pelaksanaan eksekusi sejak putusan, sistematis, dan lengkap, sehingga memudahkan dalam memahami aturan eksekusi serta memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaannya dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan. Dalam penelitian penulis di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, pada tahun 2014, gugatan PHI tentang PHK, 7 (tujuh) diantaranya diselesaikan dengan damai, 1 (satu) masuk sampai tahap permohonan eksekusi tapi perusahaan tidak membayarkan penuh sebagaimana putusan pengadilan, sedangkan 6 (enam) lainnya pengadilan belum mampu melaksanakan eksekusi.

5. Adanya dorongan dari Pemerintah untuk menegur perusahaan yang tidak menjalankan putusan Pengadilan, sehingga pemerintah bisa mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan Dinas tidak melayani surat menyurat Perusahaan-perusahaan yang bermasalah apalagi yang tidak taat kepada aturan dan sejalan dengan ini agar pemerintah mengganggu pasar dari Perusahaan tersebut. Sehingga walaupun dengan terpaksa Perusahaan akan menjalankan Putusan-putusan Pengadilan dan Pekerja mendapatkan hak-haknya setelah bekerja

